

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUMAJANG
2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	4
A. Tugas Fungsi dan SO SKPD	4
B. Sumber Daya SKPD	5
C. Kinerja Pelayanan	6
D. Tantangan dan Peluang SKPD.....	6
BAB III. ANALISIS STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	7
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan SKPD	7
B. Telaahan Visi Misi KDH dan Program.....	7
C. Telaahan Renstra Kementrian KL dan Renstra Provinsi	7
D. Penentuan Isu-isu Strategis.....	8
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	10
A. Visi dan Misi Kepala Daerah (Bupati).....	10
B. Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah SKPD.....	10
C. Strategi Kebijakan.....	12
BAB V. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN.....	14
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD	16
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	17
BAB VIII PENUTUP.....	30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I Lampiran Pendukung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, ridho dan inayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita masih dapat menjalankan program pemerintah daerah, khususnya dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tentang Penyusunan Perubahan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 2018 – 2023, untuk itu dalam melaksanakan program-program pemerintah daerah kedepan perlu penyusunan rencana kerja yang strategis agar dalam pelaksanaannya selalu berkesinambungan.

Dalam mencapai tujuan program pembangunan Kependudukan di Kabupaten lumajang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Lumajang.

Penyusunan Perubahan Renstra ini didasarkan atas alur pikir yang akan menjadi acuan dalam mencapai suatu tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan dimulai dari perencanaan , kebijakan, sasaran ,tujuan program yang hendak dicapai, pada akhirnya akan dievaluasi hasilnya sesuai dengan kegiatan yang telah disusun melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan visi dan misi yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dan semua pihak yang mendukung program Pembangunan kependudukan di Kabupaten Lumajang ada kekurangannya ini adalah merupakan ketidak sempurnaan kami dalam mengemban tugas pokok dan fungsi.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang kami susun untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan tahun 2018 – 2023 dan semoga bermanfaat dalam membangun Kabupaten Lumajang.

Lumajang, Januari 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lumajang



AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd
NIP. 196508191992031010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah melalui Perubahan Renstra tahun 2018-2023, dengan visi Kabupaten Lumajang adalah “ **Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat** ” Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut perlu ditetapkan sasaran dalam rangka pencapaian target Kinerja. Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat diketemukan sasaran dari misi RPJMD Kabupaten Lumajang yang merupakan tujuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada, ditetapkan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang yang di ampuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat ”.

Dalam menerapkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang perlu adanya indikator sasaran untuk mengukur capaian kinerja. Indikator sasaran yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu **Indek Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk**. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang merumuskan **Tujuan Kinerja Utama** yaitu **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan** dengan **Sasaran** yang dilakukan **Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan** melalui kebijakan :

1. SIFILDA (Aplikasi Filter Data) bagi penduduk pemohon pencatatan biodata baru
2. KUDA KENCAK (Kudapatkan Cepat Akta dan Kartu Keluarga)
3. RCP (Reaksi Cepat Perakaman)
4. SAHAJA (Satu Hari Jadi) Pelayanan Adminduk khususnya untuk Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Pindah Datang Penduduk
5. JEBOL ANDUK CAMAT (Jemput Bola Pelayanan Adminduk Cetak di Tempat) untuk Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Kartu Keluarga

6. GADIS PINANG (Garap Dispensasi Pindah Datang)
7. LANDUK TAMAT (Pelayanan Kependudukan Tuntas di Kecamatan)
8. E- NIKMAT (Elektronik NIK bagi Penduduk yang Mati) penerbitan Akta Kematian
9. GADIS AYU (Gisa Datang ke Posyandu)
10. PELAYANAN ONLINE ADMINDUK
11. SPASI (Sistem Pendaftaran Antrian via SMS)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Pada hakekatnya pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan sekaligus peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan dewasa ini, perlu memperhatikan faktor kependudukan (People Centered Development) dan penataan system Administrasi Kependudukan secara Nasional.

Dalam mencapai tujuan program pembangunan Kependudukan di Kabupaten lumajang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Lumajang yaitu Visi RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing , Makmur dan Bermartabat”

Misi dari RPJMD Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri ;
 - Tujuan 1 : - Meningkatkan kesejahteraan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat
 - Sasaran :
 - a. Meningkatnya akses pendidikan dan budaya literasi
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat yang responsif gender
2. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata ;
 - Tujuan 2 : - Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif

- Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup

• Sasaran :

- a. Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan daya saing daerah
- b. Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang berusaha
- c. Meningkatnya dukungan terhadap kelompok masyarakat miskin
- d. Meningkatnya pemerataan antar kelompok pendapatan
- e. Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan
- f. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana

3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance).

• Tujuan 3 : - Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas

• Sasaran:

- a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
- b. Meningkatnya kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

Adapun tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan sasaran dari RPJMD Kabupaten yaitu :

➤ **Tujuan “Meningkatnya kepuasan masyarakat”**

➤ **Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan”**

Dengan pelaksanaan penataan system Administrasi Kependudukan secara Nasional diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sebagai wujud dari pembangunan system ini, maka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

menggunakan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang sudah barang tentu harus mendapatkan dukungan secara operasional dari semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Disamping itu tuntutan masyarakat harus tetap memperhatikan dalam Pembangunan Kependudukan hal ini merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Karakteristik pembangunan dibidang kependudukan antara lain dilaksanakan melalui pelayanan prima bidang kependudukan dengan mengedepankan pelayanan cepat, tepat dan efisien rangka mewujudkan penduduk makmur, berdaya saing dan bermartabat.

1.2 Landasan Hukum

- a.** Undang-Undang Nomor, 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
- b.** Undang-Undang Nomor, 29 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c.** Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan.
- d.** Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
- e.** Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan evaluasi pada seluruh bidang pembangunan
- f.** Permendagri Nomor 25 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

- g.** Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- i.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016, tentang Kartu Identitas Anak.
- j.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l.** Peraturan Pemerintah Nomor, 108 tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala daerah.
- m.** Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- n.** Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang
- o.** Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
- p.** Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

q. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah merupakan proses perumusan langkah-langkah strategis dan sebagai acuan / dasar untuk menjalankan program 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. RPJMD mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang..

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan system pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dibidang Administrasi Kependudukan Kabupaten Lumajang.

tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- A. Terlaksananya koordinasi antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tercipta melalui penyusunan rencana kerja jangka menengah dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif.
- B. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
- C. Tercapainya penggunaan dana dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien yang berkelanjutan.
- D. Mengarahkan strategi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat;
- E. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
- F. Sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

r. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renstra, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan dasar sumberdaya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, capain kinerja dan anggaran periode sebelumnya, tantangan dan peluang Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab ini berisikan tentang isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran.

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan.

Bab ini berisikan rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif.

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indkator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

Bab VII: Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

Bab ini berisi rumusan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai lima tahun mendatang.

Bab VIII : Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi

Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah melaksanakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. penyusunan program dan anggaran ;
2. pengelolaan keuangan ;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara ;
4. pengelolaan urusan Aparat Sipil Negara (ASN) ;
5. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
6. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk ;
8. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
9. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan ;
10. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan ;
11. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan ;
12. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ;
13. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan ;
14. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; dan

15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi :
 - Kasi Identitas Penduduk
 - Kasi Pindah Datang Penduduk
 - Kasi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - Kasi Kelahiran
 - Kasi Perkawinan dan Perceraian..
 - Kasi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - Kasi Tata Kelola dan SDM TIK
 - Kasi Pengolahan dan Penyajian Data
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, membawahi :
 - Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - Kasi Inovasi Pelayanan
 - Kasi Kerja Sama

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana tercantum dalam Struktur Organisasi berikut ini (gambar 1)

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat / golongannya. Kondisi SDM / kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang Tahun 2021 secara singkat dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel : 2.1 Tabel Susunan Kepegawaian
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang 2021

NO	JABATAN STRUKTURAL	JML	PANGKAT/ GOL. RUANG	JML	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tingkat I (IV / b)	2	S.2	4	
2.	Sekretaris	0	Pembina (IV/a)	4	S.1	8	
3.	Kepala Bidang	4	Penata Tk.I (III/d)	6	D-IV	1	
4.	Sub Bag	3	Penata (III/c)	6	D-III	4	
5.	Kepala Seksi	12	Penata (III/b)	3	D-II		
			Pengatur Tk.I (II/d)	3	D-I		
6.	Staf	4	Pengatur (II/c)	2	SLTA	9	
			Juru (I/c)	1	SD	1	
	Jumlah Total	27	Jumlah Total	27	Jumlah Total	27	

1. Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada berjumlah 110 terdiri dari PNS 27 orang dan Tenaga Kontrak (Honorar) 83 orang dengan jumlah Perempuan sebanyak 49 orang dan Laki-laki sebanyak 63 orang.
2. Jumlah kendaraan operasional roda 4 = 5 unit dan roda 2 = 23 unit

3. Pembangunan Jaringan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang ada terus dikembangkan.
4. Untuk menunjang kelancaran program kependudukan maka Perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan komunikasi data dari tingkatan Kecamatan sampai dengan Pusat harus memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam memahami tugas dan fungsinya dalam bekerja dalam rangka untuk memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Mendapatkan perlakuan yang jujur dan terus terang. Sehingga menciptakan pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima bagi masyarakat.

Tabel. T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	PROSENTASE PENDUDUK YANG TERLAYANI ADMINDUK		95%		70%	75%	80%	85%	90%	37%	48%	47%	86%	86%	0.52 6	0.63 3	0.58 1	1.01 2	0.95 6
	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP el)	78%	99%		80%	85%	87%	95%	98%	84%	84%	88%	97%	91%	1.05	0.98 8	1.01 1	1.02 1	0.92 9
	Persentase Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	86%	99%		87%	88%	96%	98%	98%	86%	93%	96%	95%	95%	0.98 9	1.05 7	1	0.96 9	0.96 9
	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran	69%	94%		70%	72%	74%	81%	85%	40%	73%	74%	75%	75%	0.57 1	1.01 4	1	0.92 6	0.88 2

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase penduduk yang memiliki Akte Kematian	80%	75%		10%	25%	25%	35%	50%	1%	29%	16%	80%	84%	0.1	1.16	0.64	2.28 6	1.68
	Persentase penduduk yang memiliki Akte Perkawinan	80%	100%		85%	90%	100%	100%	100%	4%	2%	2%	90%	90%	0.04 7	0.02 2	0.02	0.9	0.9
	Persentase penduduk yang memiliki Akte Perceraian	85%	100%		85%	90%	100%	100%	100%	6%	4%	3%	79%	79%	0.07 1	0.04 4	0.03	0.79	0.79
	Lembaga Pengguna SIAK	0	9		0	0	3	5	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.28 6
	Prosentase SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	70%	87%		-	-	-	-	90%	-	-	-	-	77%	-	-	-	-	85.5 6

Tabel. T-C.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Target Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Tidak Langsung	1,434,579,364	1,580,452,283.00	1,541,811,774.00	421,882,957.00	1,438,753,074.00	1,407,526,845	1,542,289,880.00	1,530,295,356.00	303,733,824.00	1,420,597,636.00
Belanja Langsung	3,905,169,500	2,915,169,500.00	3,404,420,000.00	6,112,219,400.00	5,958,822,000.00	1,806,700,943	2,212,586,471.00	3,039,483,021.00	5,337,760,753.00	5,280,654,414.00
Total Belanja	5,339,750,878	4,495,621,783.00	4,946,231,774.00	6,534,102,357.00	7,397,575,074.00	3,214,229,802	3,754,876,351.00	4,569,778,377.00	5,641,494,577.00	6,701,252,050.00

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata -rata Pertumbuhan	
0.98	0.98	0.99	0.72	0.99	0.44	0.74
0.46	0.76	0.89	0.87	0.89	0.17	0.34
0.60	0.84	0.92	0.86	0.91	0.10	0.20

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan (Threat) Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Pemohon kurang memahami persyaratan yang akan diajukan untuk memperoleh Dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Pengetahuan Penduduk / masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih rendah.
 - c. Belum optimalnya kepedulian masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Adanya pemahaman masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Peluang (Oppartunity)
 - a. Masih adanya Penduduk / masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Adanya Petugas pelayanan di tingkat kecamatan.
 - c. Keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk mendukung terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang prima.
 - d. Tingginya tingkat mobilitas penduduk.
 - e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan
SKPD**

Tabel. T-B.35 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas Aparatur Daerah	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan birokrasi / publik masih kurang	Kurangnya pengelolaan dan pengembangan SIAK
		Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk
		Kurangnya sarana dan prasarana untuk adminitrasi kependudukan
		Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan kependudukan yang dialami

Dalam T-B.35 dikemukakan bahwa akar- akar masalah yang ada saat ini akan menjadi penyebab munculnya masalah di tiap Organisasi Pemerintahan Daerah sehingga permasalahan ini menjadi penyebab munculnya masalah makro di tingkat Daerah.

Dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan diperoleh analisis permasalahan pokok yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Belum Optimal, dari pokok masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa akar masalahnya sebagai berikut :

1. Kurangnya pengelolaan dan pengembangan SIAK
2. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen dan pelayanan adminduk
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk adminitrasi kependudukan
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan kependudukan yang dialami

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Lumajang di landasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kabupaten Lumajang. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang termasuk instansi pemerintah yang melaksanakan misi ke tiga yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

1. Visi Kepala Daerah (Bupati)

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan maksud dari ketetapan Visi tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang merupakan bagian dari visi RPJMD Kabupaten Lumajang yang menetapkan visi sebagai berikut : “ *Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Makmur, Berdaya Saing Dan Bermartabat* ”

Berdasarkan visi tersebut dapat diketemukan tujuan dari misi RPJMD Kabupaten Lumajang yang merupakan tujuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

2. Misi Kepala Daerah (Bupati)

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Renstra. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas, terukur dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada, ditetapkan Misi 3 RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

“ *Reformasi Birokrasi yang Efektif, Profesional, Akuntabel, dan Transparan untuk Mewujudkan Pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance yang berbasis teknologi informasi)* ” **meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan**, yang mana sasaran ini merupakan sebagai tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang

Yang merupakan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian K/L dan Renstra

Pada Renstra Provinsi Jawa Timur dikemukakan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, maka dengan demikian sangat sinergi dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yaitu meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk, Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK, Persentase Peningkatan pemanfaatan data dan Inovasi .

3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Memperhatikan situasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat masalah Administrasi Kependudukan yang bakal terjadi, isu dan permasalahan strategis yang dapat diidentifikasi adalah :

- a) Kelambatan proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b) Ruang pelayanan baik di tingkat kecamatan maupun di Kabupaten kurang memadai
- c) Kurangnya petugas pelayanan yang ada dengan jumlah penduduk yang banyak.
- d) Validasi dan Verifikasi data pemohon kurang dicermati oleh petugas.
- e) Kurangnya perangkat komputer dalam menyelesaikan Administrasi Kependudukan yang memadai.

Dari analisis yang didapatkan Dinas Kependudukan Kabupaten Lumajang dengan sasaran meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan diantaranya :

- 1) Komitmen pelayanan kepada masyarakat cukup tinggi
- 2) Tersedianya anggaran
- 3) Sumber Daya Manusia yang cukup
- 4) Kualitas pelayanan merupakan harapan dari masyarakat.

- 5) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengajukan permohonan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 6) Melakukan pembinaan kepada instansi terkait yang menerbitkan dokumen pendukung sebagai persyaratan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
- 7) Mensederhanakan persyaratan permohonan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 8) Mengajukan dukungan dana APBD serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kelemahan (Weakness)

- 1) Kelambatan proses penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil
- 2) Ruang pelayanan baik di tingkat kecamatan maupun di kabupaten kurang memadai.
- 3) Kurangnya pelatihan bagi petugas pelayanan
- 4) Validasi dan Verifikasi data pemohon kurang dicermati oleh petugas.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan / sosialisasi tentang arti pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyebarluasan arti pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 7) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara mandiri.
- 8) Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan data yang masih diperlukan oleh LSM dan Instansi di luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Prangkat Daerah

A. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategi, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat”.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Indikator Utamanya Meningkatkan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan, dengan indikator Kinerja Kegiatan :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan

Dalam Tabel T-C.25 menjelaskan bahwa dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dalam lima tahun mendatang Organisasi Perangkat Daerah merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dilaksanakan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi		Target		
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	82,50	84,03	86,50	87,50	88
	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (KK,KTP,KIA,AKTA, HAK AKSES)	87,04	91,60	93	94,50	96

A. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

- a. Meningkatkan Kesadaran Tentang Kesadaran Mengurus Dokumen Adminduk
- b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Adminduk sesuai SOP dan SPP
- c. Memberikan Pelayanan yang semakin mudah,cepat,memuaskan dan membahagiakan Masyarakat
- d. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Adminduk

2. Kebijakan

Faktor kunci keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan memberikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Sosialisasi Adminduk Melalui Berbagai Media
- b. Pendekatan Pelayanan Adminduk Sampai ke Desa
- c. Peningkatan Pemahaman Petugas Pelayanan Terhadap Tupoksi Sesuai dengan SOP dan SPP
- d. Meningkatnya Capaian Kepemilikan Dokumen Adminduk

Tabel. T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang

VISI		: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermatabat		
MISI 3		: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang arti pentingnya Kepemilikan Dokumen Adminduk	1	Peningkatan Sosialisasi Adminduk Melalui Berbagai Media
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur Adminduk sesuai SOP dan SPP	2	Pendekatan Pelayanan Adminduk Sampai ke Desa
		Memberikan Pelayanan yang semakin mudah,cepat,memuaskan dan membahagiakan Masyarakat	3	Peningkatan Pemahaman Petugas Pelayanan Terhadap Tupoksi Sesuai dengan SOP dan SPP
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Adminduk	4	Meningkatnya Capaian Kepemilikan Dokumen Adminduk

BAB V. STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN

Strategi Pelayanan Adminduk yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan - kebijakan dan program - program. Kebijakan merupakan arah / ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang digunakan :

VISI		: Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermatabat		
MISI 3		: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang arti pentingnya Kepemilikan Dokumen Adminduk	1	Peningkatan Sosialisasi Adminduk Melalui Berbagai Media
		Meningkatkan Kapasitas Aparatur Adminduk sesuai SOP dan SPP	2	Pendekatan Pelayanan Adminduk Sampai ke Desa
		Memberikan Pelayanan yang semakin mudah,cepat,memuaskan dan membahagiakan Masyarakat	3	Peningkatan Pemahaman Petugas Pelayanan Terhadap Tupoksi Sesuai dengan SOP dan SPP
		Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam mendukung Pelayanan Adminduk	4	Meningkatnya Capaian Kepemilikan Dokumen Adminduk

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Target yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yaitu Pelayanan yang berkualitas kepada Aparatur dan Masyarakat dengan meningkatkan pelayanan secara efektif, efisien dan berkualitas kepada aparaturnya dan Masyarakat Sesuai dengan Target Indikator pada table di bawah :

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota Lumajang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Realisasi			Target		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	77	82,50	84,03	86,50	87,50	88	90
2	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	0	87,04	91,60	93	94,50	96	100

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra (Rencana Stragis) ini memuat visi dan misi sekaligus tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Dengan disusunnya Renstra ini dapat diketahui bahwa tujuan yang akan dicapai adalah ; Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Penyusunan Renstra bermanfaat memberi arah kebijakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Kendala yang ada dalam penyusunan Renstra secara umum tidak ada, sedangkan hambatan yang dialami saat penyusunan Renstra adalah :

1. Petugas Penyusunan Renstra sangat terbatas karena melaksanakan tugas pelayanan lain yang sama pentingnya.
2. Tidak ada dukungan dana operasional tersendiri untuk penyusunan Renstra.

Demikian penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, mudah - mudahan dapat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Lumajang

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Realisasi				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
			2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
			Capaian	Rp	Capaian	Rp	Capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk		89,16%	1.112.797.000	76,40%	419.944.000	85%	331.356.000	90%	519.912.000	95%	519.912.000	95%	1.371.180.000	Bidang Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Lumajang		
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk		89,16%	1.112.797.000	76,40%	419.944.001	3 Pelayanan	291.356.000	3 Pelayanan	479.912.000	3 Pelayanan	479.912.000	3 Pelayanan	1.251.180.000				
2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	10.356.000	3 Dokumen	33.000.000	3 Dokumen	33.000.000	3 DOKumen	76.356.000				
2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		N/A	N/A	N/A	N/A	1.450.000 Dokumen	160.000.000	1.455.000 Dokumen	315.912.000	1.460.000 Dokumen	315.912.000	4.360.000 Dokumen	791.824.000				
2.12.02.2.01.03 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		N/A	N/A	N/A	N/A	60.000 Orang	61.000.000	65.000 Orang	95.000.000	70.000 Orang	95.000.000	195.000 Orang	251.000.000				
2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	8.000 Dokumen	60.000.000	8.800 Dokumen	36.000.000	9.600 Dokumen	36.000.000	26.400 Dokumen	132.000.000				
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang terlayani Pendaftaran Penduduk		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	40.000.000	85%	40.000.000	85%	40.000.000	85%	120.000.000				
2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	120.000.000				
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Sipil		195%	349.692.500	279%	389.149.000	85%	272.960.000	90%	473.112.000	95%	473.112.000	95%	1.219.184.000	Bidang Pencatatan Sipil			

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase dokumen Akte Kelahiran yang diterbitkan		N/A	N/A	N/A	N/A	85%	37.960.000	87%	95.000.000	90%	95.000.000	90%	227.960.000
	Persentase dokumen Akta Perkawinan yang diterbitkan		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	52.830.000	83%	53.830.000	85%	53.830.000	85%	160.490.000
	Persentase dokumen Akta Perceraian yang diterbitkan		N/A	N/A	N/A	N/A	70%	9.630.000	72%	25.000.000	74%	25.000.000	74%	59.630.000
	Persentase Dokumen Perubahan Status Anak yang Diterbitkan		N/A	N/A	N/A	N/A	40%	4.040.000	43%	12.000.000	46%	12.000.000	46%	28.040.000
	Persentase Dokumen Perubahan Pewarganegaraan yang Diterbitkan		N/A	N/A	N/A	N/A	70%	10.493.000	72%	11.475.000	75%	11.475.000	75%	33.443.000
	Persentase Dokumen Kematian yang Diterbitkan		N/A	N/A	N/A	N/A	85%	50.007.000	87%	65.007.000	90%	65.007.000	90%	180.021.000
2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		N/A	N/A	N/A	N/A	24.000 Dokumen	37.960.000	25.000 Dokumen	95.000.000	26.000 Dokumen	95.000.000	75000 Dokumen	227.960.000
			N/A	N/A	N/A	N/A	250 Dokumen	52.830.000	265 Dokumen	53.830.000	270 Dokumen	53.830.000	785 Dokumen	160.490.000
			N/A	N/A	N/A	N/A	50 Dokumen	9.630.000	55 Dokumen	25.000.000	60 Dokumen	25.000.000	165 Dokumen	59.630.000
			N/A	N/A	N/A	N/A	25 Dokumen	4.040.000	27 Dokumen	12.000.000	30 Dokumen	12.000.000	82 Dokumen	28.040.000
			N/A	N/A	N/A	N/A	70 Dokumen	10.493.000	74 Dokumen	11.475.000	76 Dokumen	11.475.000	220 Dokumen	33.443.000
			N/A	N/A	N/A	N/A	7.500 Dokumen	50.007.000	7.875 Dokumen	65.007.000	8.000 Dokumen	65.007.000	23375 Dokumen	180.021.000
2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Layanan	9.000.000	4 Layanan	85.800.000	4 Layanan	85.800.000	4 Layanan	180.600.000
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang terlayani Pencatatan Sipil		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	99.000.000	85%	125.000.000	90%	125.000.000	90%	349.000.000
2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil		N/A	N/A	N/A	N/A	10 Laporan	99.000.000	10 Laporan	125.000.000	10 Laporan	125.000.000	10 Laporan	349.000.000
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	1.118.780.000	85%	1.085.538.000	90%	1.084.738.000	90%	3.289.056.000
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang disajikan		N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen	2.900.000	5 Dokumen	2.738.000	5 Dokumen	2.738.000	5 Dokumen	8.376.000

Bidang
PIAK dan
PDIP

2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	51 Dokumen	2.900.000	58 Dokumen	2.738.000	58 Dokumen	2.738.000	58 Dokumen	8.376.000
			N/A	N/A	N/A	N/A	51 Dokumen							
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang Mengimplementasikan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	117.000.000	85%	142.000.000	90%	142.000.000	90%	401.000.000
2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Paket	20.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	120.000.000
			N/A	N/A	N/A	N/A	5 Jenis	20.000.000						
2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	47.000.000	2 Laporan	47.000.000	2 Laporan	47.000.000	2 Laporan	141.000.000
2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Laporan	30.000.000	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	45.000.000	3 Laporan	120.000.000
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pembinaan Tenaga SDM Adminduk		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	998.880.000	85%	940.800.000	90%	940.000.000	90%	2.879.680.000
2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	973.880.000	4 Laporan	895.800.000	4 Laporan	895.000.000	4 Laporan	2.764.680.000
2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	115.000.000
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengguna Profil Kependudukan		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	-	85%	-	90%	50.000.000	90%	50.000.000
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil kependudukan yang disusun		N/A	N/A	N/A	N/A	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	
2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	-	4 Dokumen	-	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	6.658.900.054	85%	5.892.177.945	90%	5.892.177.945	90%	18.443.255.944
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	13.000.000	85%	13.000.000	90%	13.000.000	90%	39.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	7.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100%	23.970.000	100%	6.680.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	7.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	7.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	6.157.000	100%	10.106.000	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	1 laporan	7.800.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	1 laporan	7.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	2.518.200.000	85%	2.518.200.000	85%	2.518.200.000	85%	7.554.600.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		N/A	N/A	N/A	N/A	28 (Orang)	2.500.000.000	28 (Orang)	2.500.000.000	28 (Orang)	2.500.000.000	28 (Orang)	7.500.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	7.800.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Dokumen	2.600.000	3 Dokumen	2.600.000	3 Dokumen	2.600.000	3 Dokumen	7.800.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	2.600.000	2 Dokumen	7.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100%	7.158.000	100%	9.870.000	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.600.000	3 Laporan	7.800.000
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	2.600.000	2 Laporan	2.600.000	2 Laporan	2.600.000	2 Laporan	7.800.000

Sekretariat

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		100%	5.,040,000	100%	8.202.000	2 Laporan	2.600.000	2 Laporan	2.600.000	2 Laporan	2.600.000	6 Laporan	7.800.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100%	5.,040,000	200%	8.202.001	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	7.800.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	7.800.000	85%	7.800.000	90%	7.800.000	90%	23.400.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Dokumen	2.600.000	4 Dokumen	2.600.000	4 Dokume	2.600.000	4 Dokumen	7.800.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Laporan	2.600.000	2 Laporan	2.600.000	2 Laporan	2.600.000	6 Laporan	7.800.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Fasilitas	2.600.000	3 Fasilitas	2.600.000	3 Fasilitas	2.600.000	3 Fasilitas	7.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	1.125.800.000	85%	619.300.000	90%	619.300.000	90%	2.364.400.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	15 Paket	21.800.000	15 Paket	18.300.000	15 Paket	18.300.000	15 Paket	58.400.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	6 Paket	1.055.000.000	6 Paket	545.000.000	6 Paket	545.000.000	18 Paket	2.145.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	22.000.000	1 Paket	27.000.000	1 Paket	27.000.000	3 Paket	76.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.000.000	2 Paket	4.000.000	6 Paket	12.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	23.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	3 Laporan	73.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	122.000.000	85%	125.000.000	90%	128.000.000	90%	375.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Paket	120.000.000	2 Paket	121.000.000	2 Paket	122.000.000	5 Paket	363.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	6.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dkumen	6.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase fasilitas pengadaan BMD		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	391.000.000	85%	755.500.000	90%	755.500.000	90%	1.902.000.000

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	5 Unit	400.000.000	5 Unit	400.000.000	5 Unit	800.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	0	15.000.000	3 Unit	20.500.000	3 Unit	20.500.000	6 unit	56.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	0	206.000.000	20 Unit	215.000.000	20 Unit	215.000.000	40 unit	636.000.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	0	20.000.000	5 Unit	25.000.000	5 Unit	25.000.000	10 unit	70.000.000
	Jumlah jenis prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lain yang disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	0	150.000.000	2 Jenis	95.000.000	2 Jenis	95.000.000	4 Jenis	340.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	2.280.040.000	85%	1.721.840.000	90%	1.721.840.000	90%	5.723.720.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	19.480.000	4 Laporan	23.480.000	4 Laporan	23.480.000	12 Laporan	66.440.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	3 Laporan	349.000.000	3 Laporan	347.000.000	3 Laporan	347.000.000	9 Laporan	1.043.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	1 Laporan	7.560.000	1 Laporan	7.560.000	1 Laporan	7.560.000	3 Laporan	22.680.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Laporan	1.904.000.000	4 Laporan	1.343.800.000	4 Laporan	1.343.800.000	12 Laporan	4.591.600.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	303.060.054	85%	248.537.945	90%	248.537.945	90%	800.135.944
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		N/A	N/A	N/A	N/A	28 Unit	176.060.054	28 Unit	126.537.945	28 Unit	126.537.945	28 Unit	429.135.944
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		N/A	N/A	N/A	N/A	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	15.000.000	4 Unit	45.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		N/A	N/A	N/A	N/A	200 Unit	112.000.000	200 Unit	67.000.000	200 Unit	67.000.000	200 Unit	246.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	1 Gedung	40.000.000	1 Gedung	40.000.000	1 Gedung	80.000.000
Penataan Organisasi	Persentase fasilitasi penataan organisasi		N/A	N/A	N/A	N/A	80%	20.000.000	85%	8.000.000	90%	8.000.000	90%	36.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		N/A	N/A	N/A	N/A	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	8.000.000	2 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	36.000.000